

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN SISTEM
PELAPORAN TERHADAP AKUNTANBILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAROS**

**Disusun Oleh
Nur Hawalya
NIM : 4519013004**



**SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem
Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Maros

Nama Mahasiswa : Nur Hawalya

Stambuk/NIM : 4519013004

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hasanuddin Remmang, SE., M.Si.

Faridah, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui Dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Akuntansi**



Dr.Hj.Herminawaty Abubakar, SE.,MM

Thanwain, SE., M.Si.

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KOERSINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hawalya
NIM : 4519013004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem
Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Maros

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 28 Januari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



Nur Hawalya

PRAKATA

Bismillahir rahmanir rahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros”. Shalawat serta salam penulis tunjukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan banyak contoh teladan bagi kemaslahatan umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, dorongan, doa, tenaga, ide-ide, maupun pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak memberikan hikmat dan rahmatnya dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
2. Orang Tua merupakan orang paling berjasa dalam kehidupan penulis yang setiap saat dengan cucuran keringatnya dan dalam setiap hembusan napasnya selalu mendoakan penulis, selalu sabar mendidik, membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.
3. Ibu Dr.Hj.Herminawaty Abubakar, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Thanwain SE.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bosowa sekaligus Penasehat Akademik dan segenap dosen serta staff

Fakultas Ekonomi yang sangat berjasa vi menambah ilmu pengetahuan dan banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Bosowa.

5. Bapak Dr. Hasanuddin Remmang, SE., M.Si. dan Ibu Faridah, SE., M.Si., Ak., CA. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, disela kesibukannya masih meluangkan waktu dan memberikan masukan, arahan, dan petunjuk yang sangat berarti bagi penulis.
6. Bapak Ir. H. Takdir. D, MM. selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.
7. Seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros khususnya pada bagian Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Maros yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh informasi dan data yang penulis butuhkan pada penelitian ini.
8. Muh. Agung Azis, S.E. selaku salah satu senior akuntansi yang dari awal sampai akhir telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Para sahabat-sahabatku *The Zoo* (Pita, Dewi, Kang, Rifda, Abi, Nisa dan Nensi) terimakasih telah berjuang dan kebersamai penulis dalam suka maupun duka selama berproses di Universitas Bosowa.
10. Para penghuni Ente Kadang-Kadang Ente (Dizam,Fafa, Ammar, Bobi, Kak Nadya, Kiki, Abi, Ng Tzun Vui alias Nevil, Pika, Pute dan Itto telah menjadi keluarga baru bagi penulis.

11. Seluruh Kakak-Kakak, adik-adik dan teman-teman organisasi penulis baik itu dari BEM, Himpunan dan UKM yang telah memberikan banyak warna selama masa perkuliahan serta menjadi rumah diluar bangku perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Universitas Bosowa, terkhusus kelas Akuntansi A yang telah menjadi keluarga baru untuk penulis selama berproses di Universitas Bosowa.
13. And The Last, Terima kasih kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua bantuan dan do'anya. Kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis tidak akan pernah penulis lupakan, semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah. Aamiin.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Semoga Allah SWT ridho atas skripsi ini sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 28 Januari 2023

Penulis

ABSTRAK

NUR HAWALYA. 2023. Skripsi. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros”, dibawah bimbingan Dr. Hasanuddin Remmang, SE., M.Si. sebagai Pembimbing Skripsi I dan Faridah, SE., M.Si., Ak., CA. sebagai pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kausal komparatif (*causal-comparative research*). Data yang diperoleh melalui observasi, studi pustaka, dan kuesioner yang disebar kepada 35 responden. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maros yang berjumlah 35 responden dan sampel dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah yang berjumlah 35 OPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Maros. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Kunci Kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah.

ABSTRACT

NUR HAWALYA (2023). "The Effect of Budget Target Clarity and Reporting System on Performance Accountability of Maros Regency Government Agencies", under the guidance of Dr. Hasanuddin Remmang, SE., M.Sc. as Thesis Supervisor I and Faridah, SE., M.Sc., Ak., CA. as Thesis Advisor II.

This study aims to determine the effect of clarity on budget targets, and reporting systems on the performance accountability of government agencies in Maros Regency. The type of research used in this research is quantitative research using comparative causal methods (causal-comparative research). Data obtained through observation, literature study, and questionnaires distributed to 35 respondents. The population and sample in this study were the Regional Apparatus Organizations (OPD) of Maros Regency, totaling 35 respondents and the sample in this study were Regional Revenue Agencies, totaling 35 OPD. The results of this study indicate that the clarity of budget targets and the reporting system simultaneously have a positive effect on the performance accountability of government agencies in Maros Regency. The conclusion of this study is that the Clarity of Budget Targets and the Reporting System simultaneously affect the Performance Accountability of the Local Government Agencies of Maros Regency.

Keys: Clarity of Budget Targets, Reporting Systems, Performance Accountability, Government Agencies

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KOERSINILAN	ii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	9
A. Deskripsi Teori.....	9
1. Kejelasan Sasaran Anggaran	9
2. Sistem Pelaporan	17
3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	22
4. Teori yang digunakan.....	26

B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pikir	30
D. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
1. Lokasi Penelitian	34
2. Waktu Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel.....	35
1. Populasi	35
2. Sampel.....	36
D. Instrumen Penelitian	37
E. Variabel Penelitian.....	38
1. Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	39
2. Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>).....	39
F. Jenis dan Sumber Data.....	39
1. Jenis Data	39
2. Sumber Data.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Observasi	40
2. Kuesioner.....	40
3. Studi Pustaka	42
H. Teknik Analisis Data.....	42

1. Uji Asumsi Klasik	42
2. Uji Hipotesis.....	43
I. Definisi Operasional	44
1. Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	44
2. Variabel Terikat (<i>Variabel Dependen</i>).....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.....	48
2. Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros	48
3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros	49
4. Bidang Usaha / Bagian	50
B. Deskripsi Data Responden.....	73
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	73
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	74
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	75
C. Hasil Uji Asumsi Klasik	75
1. Hasil Uji Normalitas.....	75
2. Hasil Uji Multikolinearitas	76
3. Hasil Uji Heterokedastisitas	78
D. Hasil Pengujian Hipotesis	79
1. Hasil Uji Parsial-t	79
2. Hasil Uji F	80
3. Hasil Uji R ² (Koefisien Determinasi).....	81

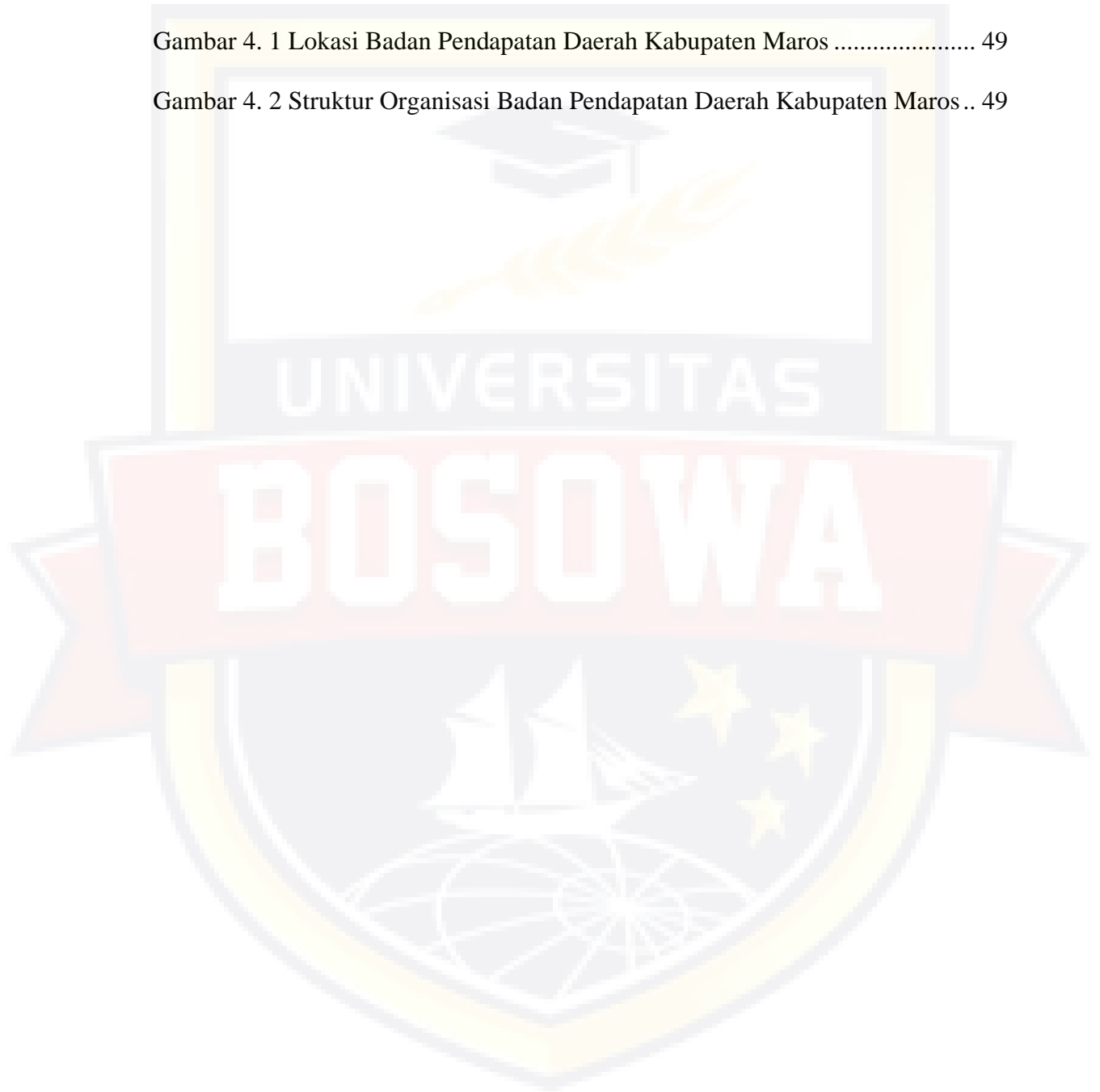
E. Pembahasan Hasil Penelitian	82
1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	82
2. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	82
3. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	35
Tabel 3. 2 Populasi Penelitian.....	36
Tabel 3. 3 Sampel.....	37
Tabel 3. 4 Instrumen Penelitian	37
Tabel 3. 5 Bobot Kuesioner Berdasarkan Pada Metode Skala Likert.....	41
Tabel 3. 6 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	45
Tabel 4. 1 Sampel Dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	73
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden	73
Tabel 4. 3 Pendidikan Responden.....	74
Tabel 4. 4 Masa Kerja	75
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas	76
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	77
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	78
Tabel 4. 8 Hasil Uji T.....	79
Tabel 4. 9 Hasil Uji F.....	80
Tabel 4. 10 Hasil Uji R ² (Koefisien Determinasi).....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4. 1 Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros	49
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros..	49



DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian.....	93
1. Surat Ijin Penelitian.....	96
2. Surat Balasan Penelitian.....	97
B. Lampiran 2 : Instrumen Penelitian.....	95
C. Lampiran 3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	104
1. Hasil Uji Normalitas	107
2. Hasil Uji Multikolinearitas.....	107
3. Hasil Uji Heterokedastisitas	108
D. Lampiran 4 Data Mentah.....	106
1. Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1).....	109
2. Sistem Pelaporan (X_2).....	111
3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	113
E. Lampiran 5 Analisis dan Hasil Pengujian Hipotesis	111
1. Hasil Parsial Uji t	114
2. Hasil Uji f.....	114
3. Hasil Uji R^2 (Koefisien Determinasi)	115
4. Tabel Parsial Uji t.....	115
5. Tabel Uji f	116
F. Lampiran 6 : Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir Skripsi.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas memiliki prinsip utama yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatannya yang merupakan tanggungjawabnya kepada prinsip yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban (Mardiasmo & Chirtianingrum,2018).

Semakin banyaknya kinerja instansi pemerintah yang terlihat tidak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat mulai menuntut kepada pemerintah atas pelayanan publik yang lebih baik. Maka dari itu nilai akuntabilitas sangatlah penting diadopsi dalam mengatur pemerintahan. Berdasarkan pada pendapat, bahwa tiada suatu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak dapat diselesaikan. Seluruh perilaku pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan wajib dipertanggungjawabkan.

Instansi pemerintah sudah seharusnya yakni menjalankan akuntabilitas kinerja dan menyajikan laporan ialah Pemerintah dari Pusat, Pemerintah dari Daerah Kabupaten/Kota. Moheriono (2012) menyatakan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di Indonesia, telah diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan akan tindak lanjuti oleh

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 589/IX/6/Y/1999 tentang penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah disempurnakan melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/2003.

Seluruh instansi pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja serta menyampaikan hasil pelaporan sebagaimana mestinya. Adapun pihak yang bertanggungjawab dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang memiliki tugas administrasi pada instansi masing-masing, setelah itu para pemimpin instansi bersama tim dan wajib mempertanggungjawabkan serta memaparkan keberhasilan/kegagalan taraf kinerja yang tercapai.

Kinerja instansi pemerintah dikatakan baik, apabila dilakukannya sistem pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat melaporkan serta mengamati dan mengendalikan kinerja manajer dalam menerapkan anggaran. Sistem dalam pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) pada atasan (kepala bagian anggaran). Informasi keuangan adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas publik dengan cara efektif, namun bukan tujuan akhir akuntansi sektor publik (Fauzan, 2017). Setiawan menyatakan, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam penelitian ini, penulis memilih Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros sebagai objek penelitian. Kabupaten Maros adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kab Maros memiliki luas wilayah 1.619,12 km² terdiri atas 14 kecamatan yang membawahi 103 desa/kelurahan. Jarak kedua kota tersebut adalah 30 km yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan metropolitan Maminasata. Kab Maros memegang peranan penting dalam pembangunan. Kab Maros menjadi daerah yang memiliki kemampuan untuk peningkatan pengelolaan keuangan daerah hal ini berdasarkan pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kab Maros.

Pada Tahun 2015, Kab Maros memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana 3 tahun sebelumnya pernah mengalami *disclamer*. Pemerintah Kab Maros melakukan tahap uji coba menggunakan aplikasi yang berbentuk web yakni Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada sistem laporan anggaran dan keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kab Maros.

Tujuan pada penerapan aplikasi ini berbentuk web yaitu dapat meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam proses pengawasan agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pelayanan publik pemerintah Kabupaten Maros. Akan tetapi, sebagai aplikasi yang baru digunakan tentunya aplikasi ini memiliki banyak kelemahan sehingga pelaksanaannya belum mencapai tahap maksimal. Contoh yang paling banyak terjadi ialah beberapa pegawai belum memahami cara aplikasi tersebut.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) juga terhalang oleh berlakunya sistem *Work From Home* (WFH) yang dapat memengaruhi kerja pegawai, karena banyaknya menu harus diisi dalam menginput pada aplikasi ini juga membuat para pegawai lalai sehingga dijadikan salah satu proses dalam penginputan sehingga laporan yang nanti dihasilkan tidak sama, sistem penggajian dan ketidaksamaan anggaran yang terhambat dikarenakan jaringan SIPKD sering error. Seiring berjalannya waktu, penerapan sistem aplikasi SIPKD ini dapat berjalan dengan baik walaupun masih banyak terdapat kendala yang belum dapat diatasi.

Selanjutnya, terkait dengan berbagai hasil penelitian tentang pengaruhnya kejelasan pada sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dari beberapa hasil penelitian ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Heksi Kinasih (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puworejo), menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hasil penelitian tersebut tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi Aprilianti, dkk (2020) dengan judul

penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian dilaksanakan oleh Dana Rizky Anatasia di tahun (2018), yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan), menyatakan bahwa secara parsial variabel sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian hasil dari penelitian tersebut tidak mendukung peneliti dilakukan oleh Muhammad Hafzhan (2021), dengan judul penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Hasil dari peneliti menyatakan bahwa variabel sistem pelaporan itu tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Hasil kejadian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kab Maros”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah ?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah ?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis
Diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemahaman baru bagi penulis terkait pengaruh kejelasan terhadap sasaran anggaran dan sistem pelaporan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros
Diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

3. Bagi Universitas Bosowa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan mendatang.

E. Lingkup Penelitian

Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada mengamati dan mengkaji apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat pembahasan yang sistematis, penulis membutuhkan alur klarifikasi sehingga dapat menghasilkan hasil riset yang baik dan mudah dipahami. Berdasarkan hal tersebut penulis akan menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan. Pada bagian ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan mengenai kajian teori penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

Bab ketiga, berusaha memaparkan tentang jenis penelitian pada lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi operasional dan jadwal penelitian.

Bab keempat, merupakan bagian hasil serta pembahasan. Hasil penelitian meliputi, pemaparan data, temuan penelitian dan pembahasan data.

Bab kelima, merupakan bagian kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti menyimpulkan beberapa hal penting dan juga memberikan saran kepada pembaca mengenai kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Deskripsi Teori

Menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menghindari teori-teori yang tidak mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut. Landasan teori ini juga menguraikan tentang teori-teori yang mendukung alat analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian.

1. Kejelasan Sasaran Anggaran

a. Pengertian Anggaran (*Budget*)

Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi sangat penting. Akhmad Azmi Basyir (2016) mendefinisikan anggaran atau *budget* sebagai rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk pencapaiannya. Menurut Precelina et al., (2019) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Setiawan, 2019).

Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif (Sasongko & Parulin, 2015). Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim & Kusufi, 2016).

Anggaran daerah berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter pada suatu instansi. Ini merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan organisasi ditetapkan secara jelas dan spesifik sehingga akan mempermudah pelaksanaan anggaran dalam mempertanggungjawabkan semua program yang telah diimplementasikan. Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan organisasi ditetapkan secara jelas dan spesifik, sehingga akan mempermudah pelaksanaan anggaran dalam mempertanggungjawabkan semua program yang telah diimplementasikan (Bhakti,dkk.. 2015).

Dalam penyusunan anggaran, anggaran yang disusun harus jelas sasaran yang ingin dicapai (Bhakti, dkk., 2015). Anggaran yang tidak jelas sasarannya, sudah dapat dipastikan akan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya dan bahkan menjadi gagal. Menurut Herawaty arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan

(*goals*) dan sasaran (*objectives*) yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Kedua komponen arah dan kebijakan umum APBD ini merupakan jawaban dari *where do we want to be* dalam proses perencanaan strategis. Tujuan merupakan arah (*direction*) yang akan menunjukkan tujuan (*destination*) daerah dimasa yang akan datang, sedangkan sasaran menunjukkan batas-batas (*milestones*) sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Dengan demikian kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran daerah dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja yang jelas, sehingga bisa mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik untuk tujuan yang diinginkan.

c. Karakteristik Anggaran

Tidak setiap rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran. Karena, anggaran memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan dengan sekedar rencana (Fitriyanti, 2016) yakni:

1) Dinyatakan dalam satuan moneter.

Penulisan dalam satuan moneter tersebut dapat juga didukung oleh satuan kuantitatif lain, misalnya unit. Penyusunan rencana kerja dalam satuan moneter tersebut, bertujuan untuk mempermudah membaca dan usaha untuk mengerti rencana tersebut. Rencana kerja yang diwujudkan di dalam suatu cerita panjang akan menyulitkan anggota organisasi untuk membaca atau mengerti. Karena itu, sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas.

2) Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun.

Bukan berarti anggaran tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, tiga bulanan misalnya atau untuk kurun waktu lebih panjang, seperti lima tahunan. Batasan waktu di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut.

3) Mengandung komitmen manajemen.

Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Tanpa upaya serius dari pihak manajemen untuk mencapainya maka penyusunan anggaran tidak akan banyak manfaatnya bagi perusahaan. Karena itu, di dalam menyusun anggaran perusahaan harus mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun adalah realistis.

- 4) Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran.

Anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun. Setelah disetujui anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus. Jadi, tidak setiap saat dan dalam segala keadaan anggaran boleh diubah oleh manajemen. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut. Perubahan asumsi internal dan eksternal memaksa untuk mengubah anggaran karena jika dipertahankan malah membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada.

- 5) Jika terjadi penyimpangan/varian didalam pelaksanaannya, harus dianalisis sebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Karena, tanpa ada analisis yang lebih mendalam tentang penyimpangan tersebut maka potensi untuk terulang lagi di masa mendatang menjadi besar. Tujuan analisis penyimpangan tersebut adalah untuk mencari penyebab penyimpangan, supaya tidak terulang lagi di masa mendatang dan agar penyusunan anggaran dikemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi yang ada.

d. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Indikator kejelasan sasaran anggaran dalam penelitian Atikah Hasanah (2021), yaitu :

1) Spesifik

Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.

2) Terukur

Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya. Meliputi: perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian.

3) Menantang tapi realistis

Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai. Meliputi : luas daerah pemasaran yang ingin dicapai, *market share* yang ingin dimiliki.

4) Berorientasi pada hasil akhir

Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai bukan pada proses atau cara mencapainya. Meliputi: sasaran program yang telah ditetapkan dan evaluasi terhadap kesulitan sasaran yang dicapai.

5) Memiliki batas waktu

Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai. Meliputi: program kegiatan

yang sesuai dengan tujuan dan sasaran anggaran yang dibuat dan program harus disertai target sasaran *output* dan *outcome*.

Dari indikator diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran diharapkan dapat membantu manajer untuk mencapai program yang telah ditentukan dan tujuan perusahaan/instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam perencanaan anggaran yang juga akan mempengaruhi kinerja dapat meningkat.

e. Anggaran Berbasis Kinerja Pada Sektor Publik (Pemerintahan)

Pengertian menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, Anggaran kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang mengutamakan upaya mencapai hasil kerja atau *output* dari perencanaan atau alokasi biaya (belanja) atau input yang ditetapkan. Sedangkan menurut Herawaty sistem anggaran kinerja adalah sistem yang mencakup penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dari kedua definisi diatas dapat diambil pemahaman bahwa anggaran kinerja merupakan sistem anggaran yang mengutamakan pencaipan tujuan (*output*) dengan penggunaan sumberdaya (*input*) yang ditetapkan melalui program.

f. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Penyusunan APBD

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik membutuhkan diterapkannya prinsip-prinsip *Good Governance*, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Ada empat prinsip pemerintahan yang baik menurut Yuniarti, (2015) yaitu akuntabilitas, transparansi, prediktabilitas,

dan partisipasi. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi dapat diterima secara langsung oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor. Prediktabilitas diperoleh karena adanya hukum dan peraturan yang jelas, diketahui sebelumnya, dan ditegakkan secara seragam dan efektif. Partisipasi diperlukan untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan dan mengecek realitas aktivitas pemerintah di lapangan.

Dalam suatu tatatan kehidupan masyarakat yang maju dibutuhkan adanya transparansi fiskal dan informasi keuangan yang tersedia bagi publik.

Syarat-syarat yang disebutkan dalam Herawaty, antara lain:

- 1) Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab
- 2) Ketersediaan Informasi bagi Publik
- 3) Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran secara terbuka
- 4) Pengujian *Integritas secara independent*.

g. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas sesuai dengan tujuan dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas

pencapaian anggaran tersebut. Anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus mencerminkan tujuan dan sasaran dari anggaran tersebut.

Apabila anggaran yang ditetapkan tidak mencerminkan tujuan yang jelas maka akan menyebabkan permasalahan, maka dari itu anggaran harus jelas sehingga anggaran tersebut memberikan manfaat yang baik dan pengelolaan anggaran akan meningkat di mata masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Helin, dkk (2022) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Sungai Penuh. Penelitian yang dilakukan oleh Isnanto et al. (2019) menunjukkan bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran suatu instansi pemerintah maka akan semakin meningkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut. Penelitian menurut Khairunsyah, dkk (2018) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Sistem Pelaporan

a. Pengertian Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk merepresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan *surplus* atau *defisit*, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam

ukuran *financial* dan *non financial* (Dewi, 2019). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Menurut Paramitha & Gayatri (2016) mengemukakan sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Menurut Jasmiati, 2018 mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan, selain itu dikatakan pula masih diperlukan prinsip-prinsip lain agar laporan keuangan berkualitas, yaitu:

- 1) Prinsip pertanggungjawaban, lingkungannya jelas dan dimengerti oleh pembaca laporan.
- 2) Prinsip pengecualian, melaporkan hal-hal yang penting-penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban, misalnya perbedaan-perbedaan antara realisasi dengan target, penyimpangan-penyimpangan dari rencana karena alasan tertentu.
- 3) Prinsip perbandingan, laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain atau dengan unit yang lain.
- 4) Prinsip akuntabilitas, prinsip ini mensyaratkan yang utama dilaporkan adalah hal-hal yang dominan membuat sukses dan gagal.

- 5) Prinsip manfaat, prinsip ini menghendaki bahwa suatu laporan harus mempertimbangkan manfaat dan biayanya.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Jasmiati, 2018). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Gayatri, dkk., 2016). Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Herawaty Instansi Pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/ kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup:

1. Laporan realisasi anggaran SKPD
2. Neraca SKPD
3. Laporan Arus Kas, dan
4. Catatan atas laporan keuangan SKPD

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

b. Indikator Sistem Pelaporan

Indikator sistem pelaporan dalam penelitian Nur Heni Safitri (2020), yaitu :

1. Penyajian laporan keuangan secara lengkap
2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi
3. Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus
4. Laporan keuangan dapat diuji

5. Informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

c. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Kusumaningrum). Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reyhan Handy Fauzan (2017) mengatakan bahwa ada jalinan yang positif atas sistem pelaporan dengan akuntabilitas instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto, dkk (2019) bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, semakin lancar penggunaan sistem pelaporan maka pengelolaan keuangan semakin akuntabel dan transparan. Hasil penelitian ini mendukung *agency theory* bahwa pemerintah selaku *agent* sudah menjalankan kewajiban melaporkan laporan keuangan berdasarkan SAP dan

persyaratan pelaporan keuangan secara detail dan transparan kepada masyarakat selaku prinsipal.

Dalam penelitian Paramitha dan Gayatri (2016), Hidayatullah dan Herdjiono (2015), Fauzan (2017), Mega Cahyani dan Karya Utama (2015), Edipson Bayer (2017). Mengemukakan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mikhosi (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap ingin menang sendiri (mementingkan diri sendiri), tetapi manajemen tidak boleh menyalahi bawahannya. Oleh karena itu, manajemen puncak yang berkompeten harus turun tangan secara langsung agar bisa melihat secara langsung bagaimana menciptakan teknik yang baik dan bagaimana meningkatkan loyalitas para eksekutif dibawah SKPD tersebut.

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAN (2003:3) menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintah

yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

b. Indikator Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah (PEMDA) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator Kinerja Pemerintah dalam penelitian Nur Heni Safitri (2020), yaitu :

- 1) Penetapan perencanaan strategik
- 2) Pengukuran kinerja
- 3) Pelaporan kinerja
- 4) Pemanfaatan informasi kinerja

c. Prinsip-Prinsip Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut LAN (2003) pedoman penyusunan pelaporan AKIP tercantum juga bahwa pelaksanaan AKIP harus memperhatikan antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Prinsip-prinsip yang lazim dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Menurut Indra Bastian (2001) prinsip-prinsip dalam penyusunan LAKIP sebagai berikut :

- 1) Prinsip pertanggungjawaban (*adanya responsibility center*), sehingga lingkupnya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (*conrollable*) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti oleh pembaca laporannya.
- 2) Prinsip Pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik

keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan target/ standar/ skema/ *budget*, penyimpangan dari skema karena alasan tertentu dan sebagainya.

- 3) Prinsip manfaat, yaitu laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya.

Prinsip-prinsip penyusunan LAKIP berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2012 pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip lingkup pertanggungjawaban, hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.
- 2) Prinsip prioritas, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak selanjutnya.
- 3) Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

d. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu sistem yang dibuat pemerintah untuk mendukung terwujudnya *good governance*. Penerapan SAKIP yang efektif, menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam mewujudkan *good governance* berjalan dengan baik. *Good governance* ditandai dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja, transparansi atas penyerapan

anggaran dan laporan program serta kegiatan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah kebijakan yang diambil pemerintah untuk dilaksanakan oleh para aparatur pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kerjanya yang didalamnya terdiri atas rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur sejalan tujuan yang ingin diraih.

Desain sistem pengukuran kinerja untuk pemerintah daerah dalam hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan SAKIP sehingga penerapan SAKIP lebih efektif.

4. Teori yang digunakan

a) Teori *Kontigensi*

Teori kontingensi adalah aliran teori manajemen yang menekankan pada situasi atau kondisi tertentu. Teori kontingensi menyebutkan hanya pada organisasi (perusahaan) tertentu dapat diterapkan sistem pengendalian manajemen yang cocok. Asumsi bahwa ada kesesuaian antara sistem pengendalian manajemen dan variabel konstekstual organisasi menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan dan individu yang terlibat di dalamnya.

Penggunaan konsep kesesuaian dalam teori kontijensi menunjukkan tingkat kesesuaian antara faktor kontekstual dan sistem akuntansi manajemen (seperti sistem penganggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan) yang akan memungkinkan manajer untuk meningkatkan prestasi organisasi. Dalam ruang lingkup pemerintahan kesesuaian antara faktor-faktor kontekstual misalnya akuntabilitas kinerja dan sistem akuntansi manajemen dalam hal ini sistem penganggaran, sistem akuntansi, dan sistem pelaporannya akan memungkinkan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

b) Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan landasan teori pada praktik bisnis dalam perusahaan dari dulu sampai saat ini. Teori ini berakar pada sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama yang digunakan teori tersebut menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima kekuasaan (*agency*) yaitu manajer, yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Teori keagenan (*Agency theory*) terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan karena populasi penelitian ini merupakan SKPD dimana pemerintah yang bertindak sebagai agen yang juga harus menetapkan prosedur tertentu agar masyarakat dapat merasakan pelayanan terbaik dari pemerintah. Masyarakat menilai kinerja pemerintah dari laporan keuangan dan jasa yang dihasilkan, sedangkan laporan keuangan dan jasa yang dihasilkan tergantung pada strategi yang diterapkan pemerintah. Jika kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat

akan mempercayai pemerintah. Dengan demikian, masyarakat berharap pemerintah bekerja dengan baik.

B. Penelitian Terdahulu

Dengan adanya penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebuah dasar bagi penulis untuk memulai sebuah penelitian. Untuk mendukung hasil dari penelitian ini, penulis akan menyajikan beberapa hasil dari sebuah penelitian terdahulu yang terkait dengan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun hasil penelitian terdahulu yang ditemukan penulis yaitu :

TABEL 2. 1
PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yulia Cantika (2018)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji analitik menunjukkan bahwa pengendalian internal merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2.	Dewi Aprilianti, Mulyaningwulan, Herwin Kurniawan	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan pengendalian internal

	(2020)	Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan		dan sistem pelaporan secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara simultan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3.	Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno (2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi pelaporan berpengaruh positif secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan dan Kinerja.
4.	Muhammad Hafzhan	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan).	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan yang terjadi antara kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah hubungan yang negatif dimana ketika kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan ditingkatkan, maka akan berdampak penurunan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hubungan yang terjadi antara pengendalian akuntansi kinerja instansi pemerintah adalah hubungan yang positif dimana ketika pengendalian akuntansi ditingkatkan, maka akan berdampak pada kenaikan

5.	Atikah Hasanah	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Vi (Medan).	Metode Kuantitatif	akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi memiliki pengaruh yang penting untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
----	-------------------	--	-----------------------	---

C. Kerangka Pikir

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi 26 wewenang daerah dan didanai oleh dana publik yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

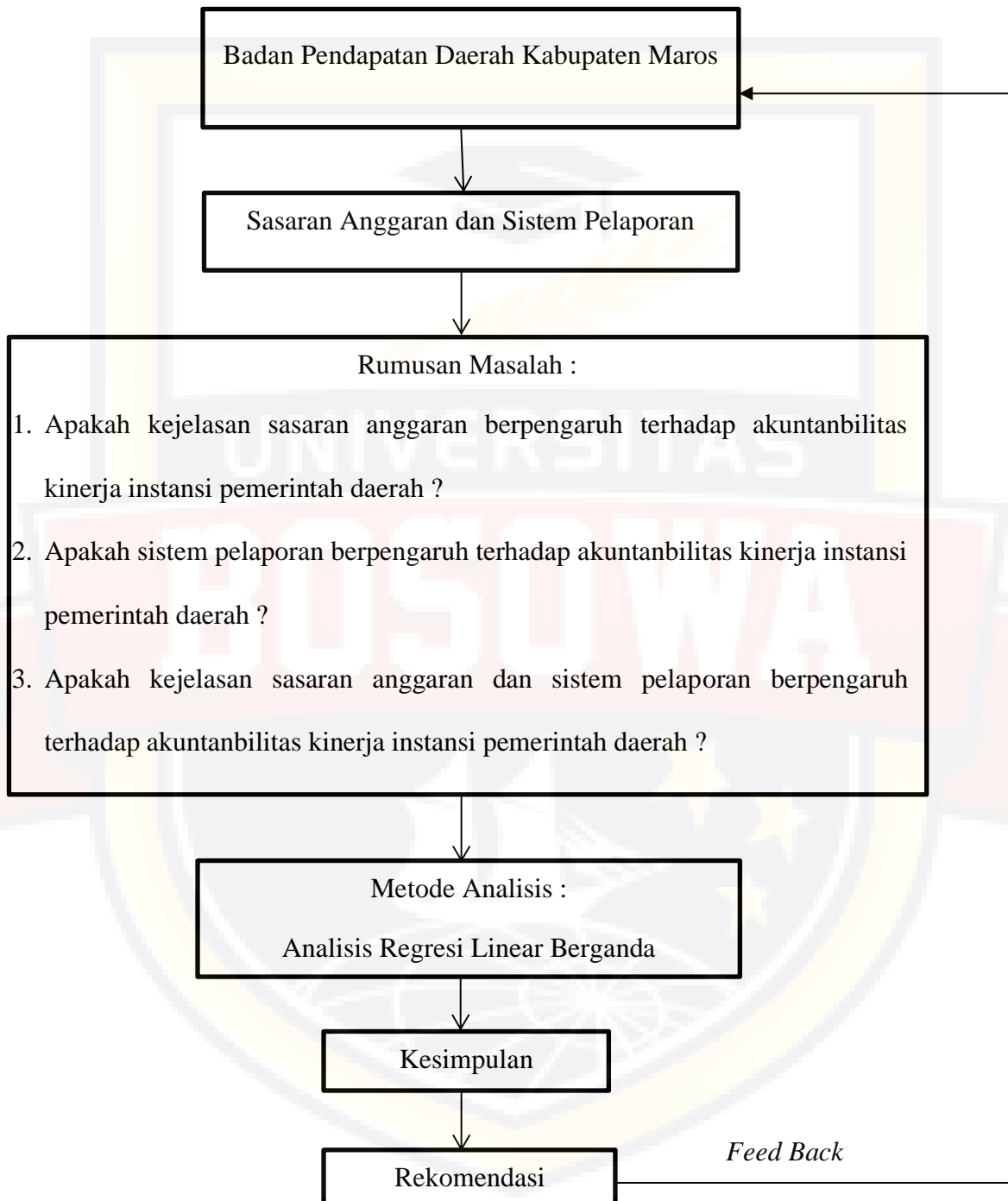
Dalam anggaran, perlu juga diketahui tentang kejelasan sasaran agar dapat memudahkan individu untuk menyusun target anggaran. Pencapaian kinerja material yang baik harus juga menggunakan sistem pelaporan. Sistem pelaporan yang baik juga diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan surat anggaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pengendalian akuntansi, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan yang jelas diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial

khususnya pada pengelolaan keuangan pemerintah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Untuk lebih jelasnya disajikan kerangka pikir yang dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



GAMBAR 2. 1
KERANGKA PIKIR



Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini berusaha akan menjelaskan hubungan antara dua variable *independen*

(bebas) dan satu variable *dependen* (terikat). Variabel *independen* yang pertama yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran dan Variabel independen yang kedua yaitu Sistem Pelaporan.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau rumusan masalah penelitian yang berdasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan (Sugiyono,2008). Berdasarkan kerangka pikir yang dibuat, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

- H1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.
- H2 : Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.
- H3 : Kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2018). Adapun tujuan dari analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik data dalam bentuk angka yang digunakan yaitu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2016), penelitian ini merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode kausal komparatif (*causal-comparative research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab-akibat dan pengaruh antara dua variabel atau lebih.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang terletak di Jalan Asoka No.5, Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 90561. Peneliti memilih daerah ini sebagai tempat penelitian karena merupakan kampung halaman peneliti dan merupakan tempat magang peneliti sehingga mudah diakses oleh peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang akan dikaji.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini diperkirakan selama kurang lebih 1 bulan yang dimulai pada bulan Januari sampai Februari 2023.

TABEL 3. 1
WAKTU PENELITIAN

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI			
1	Pengajuan Judul	■							
2	Orientasi (Objek Penelitian)	■							
3	Seminar Judul		■						
4	Pengurusan Ijin Penelitian		■						
5	Pembuatan Proposal			■					
6	Konsultasi Proposal			■	■				
7	Seminar Proposal					■			
8	Pengumpulan Data, Analisis Data						■	■	■
9	Penulisan dan Konsultasi						■	■	■
10	Ujian Skripsi							■	■

Sumber : Diolah Sendiri

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros terdiri dari 35 orang. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maros. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kabupaten Maros berjumlah 35 yang terdiri dari 10 Sekretariat Badan Pendapatan daerah, 5 bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, 5 bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah , 10 bidang pengelolaan dan pendapatan daerah, 5 PBB & BPHTB.

TABEL 3. 2
POPULASI PENELITIAN

No.	Nama OPD	Jumlah
1	Sekretariat	10
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	5
3	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5
4	Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah	10
5	PBB & BPHTB	5
Total		35

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Sedangkan pengukuran sampel ialah suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang telah didapatkan dalam suatu penelitian. Peneliti sadar bahwa pada penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu penelitian maka peneliti memilih sampel di Badan Pendapatan Daerah yang berjumlah 35 OPD.

TABEL 3. 3
SAMPEL

No.	OPD	Jumlah
1	Badan	35
Total		35

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

D. Instrumen Penelitian

Penelitian adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyedia informasi agar dapat menyelesaikan masalah. Keberadaan instrumen penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan kegiatan penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian yaitu angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

TABEL 3. 4
INSTRUMEN PENELITIAN

No.	Variabel	Indikator	Skala
1	Kejelasan Anggaran	Sasaran 1. Spesifik 2. Terukur 3. Menantang tapi realistis 4. Berorientasi pada hasil akhir 5. Memiliki batas waktu	1-4
2	Sistem Pelaporan	1. Penyajian Laporan keuangan secara lengkap 2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan	1-4

sebagai alat koreksi.

3. Informasi keuangan

disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus.

4. Laporan keuangan dapat diuji.

5. Informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1.	Penetapan perencanaan strategik	1-4
		2.	Pengukuran kinerja	
		3.	Pelaporan kinerja	
		4.	Pemanfaatan informasi kinerja.	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

E. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemuan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:68).

Terdapat dua macam variabel dalam penelitian ini, yaitu :

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas atau sering dikenal dengan sebutan variabel stimulus, *predictor*, dan *antecedent*. Menurut Sugiyono (2019), variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat (*dependent*). Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan Sistem Pelaporan (X2).

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Menurut Grahita Chandarin (2017), variabel terikat merupakan variabel yang menjadi daya tarik atau fokus peneliti. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

F. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh pada penelitian ini ialah jenis data kuantitatif, yaitu jenis data yang diperoleh dari instansi/badan berupa angka atau bilangan sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

2. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan pada penelitian ini ialah data primer.

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Data primer yang peneliti gunakan yakni data yang diolah berupa angka didapatkan dari skala kuesioner yang peneliti sebarkan kepada responden yang selanjutnya diolah menggunakan *software* SPSS 23. Kuesioner yang peneliti bagikan kepada responden merupakan kuesioner dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Sumber dari penelitian ini adalah seluruh OPD yang berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini antara lain :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap aktivitas keseharian pada SKPD pemerintah Kabupaten Maros untuk kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono). Berdasarkan pengertian di atas, maka data dalam penelitian ini didapatkan dikarenakan peneliti terjun

langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dari pihak yang bersangkutan atau disebut juga data primer.

Selanjutnya, peneliti melakukan pengambilan data secara langsung pada objek penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden yang telah dijadikan sampel. Kuesioner ini berisi beberapa pertanyaan yang wajib dijawab oleh responden yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan metode pengukuran skala likert, yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Tingkat persetujuan yang digunakan pada skala likert 1-4 pilihan, dengan gradasi dari Sangat tidak setuju (STS) hingga Sangat Setuju (SS).

Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan tabel sebagai berikut :

TABEL 3. 5
BOBOT KUESIONER BERDASARKAN PADA METOD SKALA LIKERT

No.	Sikap	Skala
1.	Sangat Setuju	4
2.	Setuju	3
3.	Tidak Setuju	2
4.	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Skala *Likert*

3. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono, studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi yang diteliti. Teknik pengumpulan data didapatkan dengan cara melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan dan laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Peneliti memperoleh data kepustakaan berasal dari jurnal-jurnal, buku maupun penelitian sejenisnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data menggunakan aplikasi SPSS versi 23 untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya menggunakan uji kualitas data dan analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*). Metode ini bertujuan untuk mengungkapkan seberapa besar pengaruh antara beberapa variabel *independent* dan variabel *dependent*.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2013), uji normalitas data bertujuan untuk menguji data dengan model regresi berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan uji *Kolmogorov-Smirnov*.

b. Uji multikolinieritas

Menurut Husein Umar (2008) uji multikolinieritas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Dengan menggunakan nilai toleransi, nilai yang berbentuk harus diatas 10% dengan menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor*), nilai yang terbentuk harus kurang dari 10, jika tidak maka terjadi multikolinieritas, dan model regresi tidak layak untuk digunakan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu observasi ke observasi lain.

Heteroskedastisitas menggambarkan nilai hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Delete Residual* nilai tersebut. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada satu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot model*. Analisis pada gambar *Scatterplot* yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi linear berganda secara

parsial. Uji t juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diuji pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y secara bersama-sama dengan membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel. Jika nilai Fhitung > Ftabel, maka hipotesis didukung yaitu, variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai Fhitung < Ftabel maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

c. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji R^2 (Koefisien Determinasi) digunakan untuk menguji seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (*variable dependent*). Nilai koefisien determinasi diantara 0 hingga 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini dapat disimpulkan, jika R^2 mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika $R^2 = 0$ maka menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

I. Definisi Operasional

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen (*independent variables*) disebut juga dengan variabel bebas merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab

munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf x. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang tergolong dalam variabel independen yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan Sistem Pelaporan (X2).

2. Variabel Terikat (*Variabel Dependen*)

Variabel dependen (*dependent variables*) atau variabel terikat merupakan jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

TABEL 3. 6
DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN

No.	Jenis Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Perwujudan suatu instansi untuk dapat berfokus pada pencapaian sasaran.	1. Penetapan perencanaan strategik 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Pemanfaatan Informasi Kinerja	<i>Likert</i>
2.	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	Sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran	1. Spesifik 2. Terukur 3. Menantang tapi realistis 4. Beriorientasi pada hasil akhir 5. Memiliki batas waktu	<i>Likert</i>

	anggaran tersebut.		
3.	Sistem Pelaporan (X2)	suatu sistem yang dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran), yang dimana sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggung jawaban (Modul akuntabilitas instansi pemerintah bpkp 2011).	1. Penyajian Laporan Keuangan secara lengkap dan keuangan secara lengkap 2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi 3. Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan khusus 4. Laporan keuangan dapat diuji 5. Informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.619,12 km² Kab Maros memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Kota Makassar. Sebab, sebagai sabagai salah satu daerah perbatasan dan juga merupakan gerbang wilayah Maminasata bagian utara. Kabupaten Maros memiliki luas wilayah 1.619,12 km² dan terbagi menjadi 14 kecamatan.

Sebelum Kotamadya tingkat II Makassar terbentuk, Dinas pasar, Dinas Air, Minum dan dinas penghasilan Daerah di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Tepatnya dalam kurun waktu tujuh tahun lalu, pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros berubah nama menjadi Badan Pendapatan

Daerah yang saat ini dikenal dengan BAPENDA. Terkait dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah. Pemerintah Kabupaten Maros sesuai dengan fungsinya yang berkewajiban melakukan peningkatan pengelolaan penerimaan daerah yang optimal dan profesional sehingga berusaha sebaik mungkin dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

1. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros :

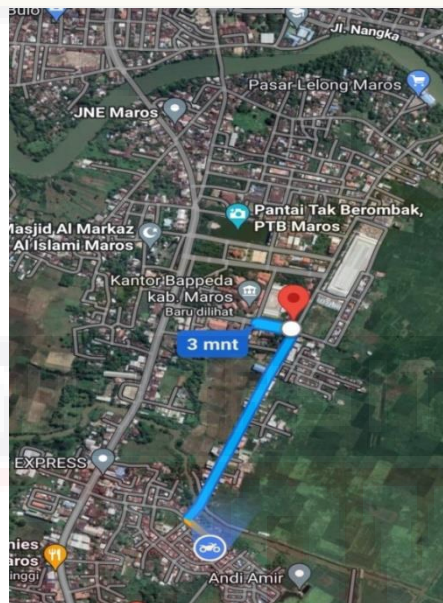
“Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing”

Misi : Sehingga dapat mewujudkan sebuah Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros maka ditetapkan misi sebagai yakni :

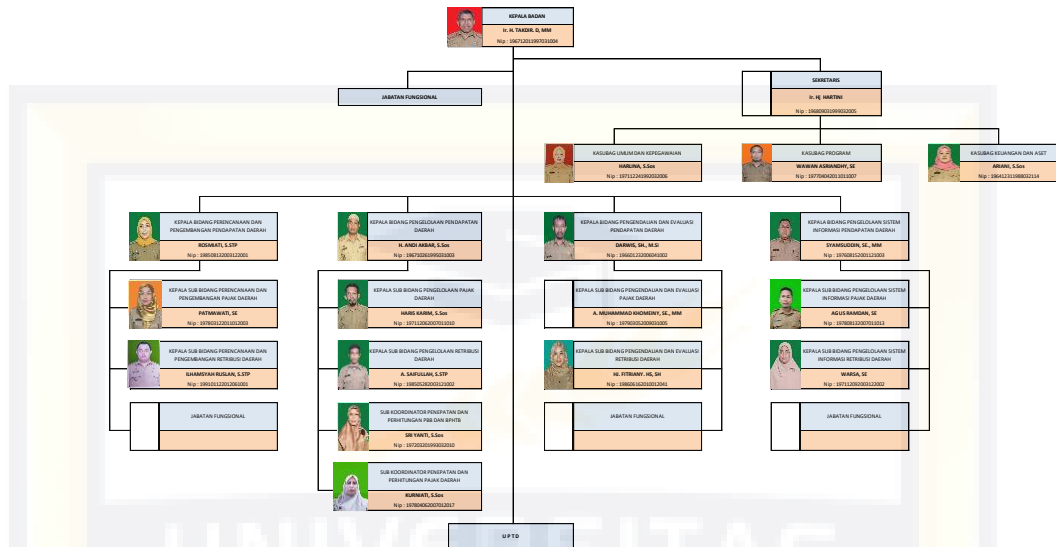
- a. Meningkatkan sebuah kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik.
- b. Meningkatkan sebuah kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan dasar, penegakan hukum, nilai budaya serta keagamaan secara inklusif.
- c. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan penataan wilayah yang secara merata sesuai kondisi geografis suatu wilayah.
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

2. Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab Maros berada di Jalan Asoka No.5, Pettuadae, Kecamatan. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

GAMBAR 4. 1**LOKASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAROS****3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros****GAMBAR 4. 2****STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MAROS**

BAGAN / STRUKTUR, SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH



4. Bidang Usaha / Bagian

Masing-masing bagian Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah tugas dari masing masing bagian organisasi :

a. Kepala Badan

Berikut tugas Kepala Badan, meliputi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas:
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya:

- 6) Merumuskan kebijakan penvelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah:
- 7) Melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan pajak di: rerrihusi daerah, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah:
- 8) Memberikan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah:
- 9) Melaksanakan pengoordinasian. penyusunan, konsolidasi, rekonsiliasi, analisis verifikasi serta pembidanan dibidang pendapatan daerah:
- 10) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah:
- 11) Melaksanakan administrasi badan pendapatan daerah:
- 12) Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan:
- 13) Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan:
- 14) Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan:

- 15) Melaksanakan koordinasi pengalokasian, penyusunan, perencanaan, penyediaan serta evaluasi dibidang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah:
- 16) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pendapatan daerah:
- 17) Melaksanakan pengoordinasian, penyusunan, konsolidasi, rekonsiliasi, analisis verifikasi serta pembinaan dibidang pendapatan daerah:
- 18) Mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah:
- 19) Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis badan pendapatan daerah :
- 20) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi :
- 21) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan:
- 22) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan: dan

- 23) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Sekretariat

Uraian tugas sekretaris meliputi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui pelaksanaan tugas.
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Mengoordinir penyusunan sop seriap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbagian.
- 7) mengoordinir penyusunan lakip badan sebagai landasan laporan kinerja pegawai.
- 8) Mengoordinasikan penyusunan produk hukum daerah dan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di lingkungan badan.
- 9) Menyusun rencana program kegiatan dan penganggaran sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- 11) Melaksanakan administrasi ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- 12) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- 13) Melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan program kegiatan seluruh unsur organisasi Badan.
- 14) Mengoordinasikan pelaksanaan. Pengendalian dan penyusunan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja Badan:
- 15) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana.
- 16) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- 17) Melaksanakan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi.
- 18) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 19) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan: kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian, yaitu :

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian.

Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian untuk mengetahui pelaksanaan tugas.
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

- 6) Menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 7) Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data pada aplikasi kepegawaian.
- 8) Menghimpun daftar hadir pegawai sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk tertib administrasi.
- 9) Menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan bezetting pegawai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersedia lengkap dan akurat.
- 10) Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi sehingga dapat memperlancar akses data kepegawaian.
- 11) Melakukan administrasi, pengirsipan naskah dinas, pengklarifikasian dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar menurut jenisnya sesuai ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencariannya kembali.
- 12) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan dalam formasi pegawai.
- 13) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi penilaian pelaksanaan pekerjaan jabatan/on the job training.
- 14) Melakukan kegiatan keprotokoleran lingkup Badan.

- 15) Mengoordinasikan penyusunan Produk Hukum Daerah di lingkungan Badan.
- 16) Melakukan pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di lingkungan Badan.
- 17) Melakukan kegiatan kehumasan dan publikasi serta mengoordinasikannya dengan unsur dalam lingkup Badan maupun luar Badan.
- 18) Menyediakan dan melaksanakan administrasi perkantoran, penggandaan, pencetakan dan pengarsipan dokumen.
- 19) Memfasilitasi keamanan dan ketertiban lingkungan Badan.
- 20) Mengatur jam kerja serta mengawasi disiplin kerja pegawai.
- 21) Memfasilitasi pelayanan hukum dalam lingkup Badan.
- 22) Melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala.
- 23) Menyusun daftar urut kepangkatan.
- 24) Membuat usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan usulan pensiun.
- 25) Membuat dokumen penugasan pegawai.
- 26) Melakukan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan formasi jabatan.
- 27) Melakukan administrasi cuti pegawai.

28) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi.

29) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

30) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian umum dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. Dan

31) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Subbagian Program

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan evaluasi laporan kinerja.

Tugas Subbagian Program, yaitu :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui pelaksanaan tugas.

- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 7) Menyusun LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai.
- 8) Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data pada aplikasi kepegawaian.
- 9) Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 10) Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan usulan setiap kegiatan dilingkup Badan.
- 11) Mengumpulkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 12) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unsur terkait dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja.
- 13) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan evaluasi kinerja.
- 14) Menyiapkan bahan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai landasan kinerja Pegawai.

- 15) Menyiapkan, menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan untuk lebih transparan dalam pengelolaan data dan informasi.
 - 16) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan tahunan untuk bahan pertanggungjawaban pimpinan.
 - 17) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi.
 - 18) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 19) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
 - 20) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- c) Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris membantu Sekretaris dalam penatausahaan administrasi keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang keuangan serta aset.

a. Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset

Berikut uraian tugas Tugas Subbagian Keuangan dan Aset :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan dan Aset untuk mengetahui pelaksanaan tugas.
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 7) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data keuangan untuk mendapatkan data yang akurat.
- 8) Melakukan pengendalian keuangan lingkup Badan yang terencana sebagai kontrol agar terhindar dari kesalahan.
- 9) Melakukan pengendalian pengeluaran kas (cash flow) sebagai kontrol terhadap transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas.
- 10) Menyusun dokumen terhadap penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup Badan.
- 11) Melakukan pengujian dan analisa Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang

Persediaan (TU) dan Langsung (LS) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup Badan.

- 12) Melakukan penatausahaan keuangan yang meliputi penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran.
- 13) Melakukan penerimaan, penyimpanan dan penatausahaan seluruh pendapatan sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- 14) Menyusun dan menerbitkan dokumen yang diperlukan dalam pencairan dan pertanggungjawaban anggaran.
- 15) Meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pencairan anggaran.
- 16) Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan pendistribusian pemeliharaan, inventarisasi dan prosedur yang berlaku agar pengelolaan asset dapat berjalan dengan baik dan benar.
- 17) Mengatur operasional kendaraan dinas, parkir, gedung kantor, perumahan dinas, asrama, dan halaman kantor.
- 18) Membuat laporan keuangan realisasi anggaran belanja menurut rekening berdasarkan pengeluaran SPM.
- 19) Melakukan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kesejahteraan pegawai.
- 20) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari kesalahan.

- 21) Meneliti kebenaran pertanggung jawaban bendahara pengeluaran sesuai peraturan dan prosedur agar terhindar dari kesalahan.
- 22) Menyusun laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilingkungan Badan.
- 23) Menerima, menyimpan dan mendistribusikan barang.
- 24) Melakukan, mengelola dan mengawasi penerimaan dan pemanfaatan pendapatan dari program bantuan.
- 25) Mengumpulkan dan mengolah data barang persediaan.
- 26) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- 27) Melakukan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unsur lain dalam lingkup Badan maupun luar Badan dengan sepengetahuan atasan.
- 28) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi.
- 29) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 30) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Aset dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan

31) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Adapun Tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah untuk mengetahui pelaksanaan tugas.
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Menyusun SOP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 7) Menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai.
- 8) Merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
- 9) Merumuskan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 10) Melaksanakan analisis regulasi pendapatan daerah.

- 11) Merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 12) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah.
- 13) Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah.
- 14) Merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat.
- 15) Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi.
- 16) Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi.
- 17) Melaksanakan perencanaan pengelolaan pajak daerah.
- 18) Melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi daerah.
- 19) Melaksanakan analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah.
- 20) Melaksanakan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- 21) Melaksanakan analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah.
- 22) Melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah.
- 23) Melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah.

- 24) Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Bidang.
- 25) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi.
- 26) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 27) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- 28) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun Tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pengelolaan pendapatan daerah untuk mengetahui pelaksanaan tugas.
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

- 6) Menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 7) Menyiapkan bahan lakip sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- 8) Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 9) Melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendataan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah.
- 10) Melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 11) Melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- 12) Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah.
- 13) Melaksanakan pelaporan pendapatan daerah.
- 14) Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 15) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah.
- 16) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah.
- 17) Melaksanakan penetapan wajib pajak daerah.
- 18) Melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah.
- 19) Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah.
- 20) Melaksanakan penagihan pajak daerah.
- 21) Melaksanakan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah.
- 22) Melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi daerah.
- 23) Melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah.
- 24) Melaksanakan penyelesaian keberatan pajak daerah.

- 25) Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- 26) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi.
- 27) Menilai kinerja pegawai asn sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 28) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- 29) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Berikut uraian tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah:

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah untuk mengetahui pelaksanaan tugas.
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

- 6) Menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 7) Menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai.
- 8) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
- 9) Melaksanakan perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 10) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah.
- 11) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 12) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebaran informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat.
- 13) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi.
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah.
- 15) Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah.
- 16) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 17) Melaksanakan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.

- 18) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 19) Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah.
- 20) Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
- 21) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi.
- 22) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 23) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. dan
- 24) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Berikut uraian tugas Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Sistem Pendapatan Daerah :

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah untuk mengetahui pelaksanaan tugas.
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 7) Menyiapkan bahan LAKIP sebagai landasan laporan kinerja pegawai.
- 8) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi.
- 9) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah.
- 10) Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah berbasis teknologi informasi.
- 11) Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 12) Merumuskan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 13) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah.

- 14) Melaksanakan pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 15) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 16) Menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal.
- 17) Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah.
- 18) Melaksanakan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah.
- 19) Melaksanakan pengolahan data retribusi daerah.
- 20) Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah.
- 21) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi.
- 22) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 23) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- 24) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. Deskripsi Data Responden

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros secara langsung. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 40 kuesioner. Peneliti menyajikan sebagai berikut :

TABEL 4. 1
SAMPEL DAN TINGKAT PENGEMBALIAN KUESIONER

Keterangan	Jumlah
Penyebaran Kuesioner	40
Kuesioner yang kembali	35
Kuesioner yang dapat diolah	35
Tingkat Pengembalian	87,5%

Sumber : Data Primer yang diolah,2023

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 40 kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali sebanyak 35 kuesioner. Berdasarkan penelitian tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 87,5%. Hal ini menunjukkan tingkat pengembalian kuesioner pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Maros cukup tinggi.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini peneliti menyajikan tabel responden berdasarkan umur :

TABEL 4. 2

JENIS KELAMIN RESPONDEN

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-Laki	13	37%
Perempuan	22	63%
Jumlah	35	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 22 responden (63%) dan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13 responden (43%).

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berikut ini disajikan tabel responden berdasarkan jenjang pendidikan :

TABEL 4.3
PENDIDIKAN RESPONDEN

Pendidikan Responden	Jumlah	Presentase (%)
SLTA	9	26%
D3	1	3%
S1	22	63%
S2	3	8%
Jumlah	35	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenjang pendidikan mayoritas pada responden yang berpendidikan dengan kategori strata satu (S1) sebanyak 22 responden atau sebesar 63%, sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) sebanyak 3 responden atau sebesar (3%), Diploma (D3) sebanyak 1 responden atau sebesar 3%, dan kategori strata dua (S2) sebanyak 3 responden atau sebesar 8%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berikut ini disajikan data responden berdasarkan masa kerja :

TABEL 4. 4
MASA KERJA

Masa kerja	Jumlah	Presentase (%)
<1 tahun	2	6%
1-5 tahun	7	20%
>5 tahun	26	74%
Jumlah	35	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan pada taembl 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan masa kerja lebih dominan dengan kategori >5 tahun sebanyak 26 responden atau sebesar 74%, masa kerja dengan kategori <1 tahun sebanyak 2 responden atau sebesar 6% dan masa kerja dengan kategori 1-5 tahun sebanyak 7 responden atau sebesar 20%.

C. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Pada penelitian ini, uji normalitas data dilakukan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan alat bantu SPSS 23. Uji Normalitas data bertujuan digunakan untuk menguji data model regresi berdistribusi normal atau tidak normal (Imam Ghozali,2013). Menurut Ghozali (2013), jika signifikansi $>0,05$ maka distribusi data bisa dikatakan normal. Adapun hasil uji normalitas telah peneliti sajikan sebagai berikut :

TABEL 4. 5
HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		35
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.48488624
<i>Most extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.104
	<i>Positive</i>	.091
	<i>Negative</i>	-.104
<i>Test Statistic</i>		.104
<i>Asymp Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is normal

b. Calculated from data

c. Lilliefors significance correction

d. This is a lower bound of the true significance

Sumber : Data yang diolah,2023

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa nilai signifikansi sebesar 200. Maka dari itu, nilai signifikansi lebih besar daripada $\alpha = 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian uji asumsi normalitas terpenuhi dalam model regresi dalam penelitian.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini, uji multinearitas data dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 23. Tujuan dari uji multikoliaritas adalah untuk melihat apakah korelasi yang tinggi antara variabel *independen* model regresi linear berganda jika terdapat korelasi yang kuat antar variabel independen, maka hubungan antar variabel *independent* terhadap variabel *dependent* menjadi

terganggu. Menurut Sunjoyo,dkk (2013), nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Untuk lebih jelasnya, berikut peneliti telah menyajikan data pada tabel di bawah ini:

TABEL 4. 6
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.592	3.570		1.006	.322	
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.355	.110	.407	3.228	.003	.651
	Sistem Pelaporan	.533	.133	.508	4.022	.000	.651

a. *Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja*

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) dan Sistem Pelaporan (X_2) memiliki hasil nilai VIF yang sama yaitu $1,536 > 0,10$. Sedangkan untuk nilai *Tolerance* pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) dan Sistem Pelaporan (X_2) juga memiliki nilai yang sama yaitu $0,651 < 10$. Dari hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa tidak terdapat multikoloniaritas pada penelitian ini sehingga data dapat digunakan pada penelitian ini.

3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 23. Tujuan dari uji hereroskedastisitas ini terdapat ketidaksetaraan varians untuk residu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menghitung sig t apakah nilainya lebih kecil atau lebih besar. Jika sig t lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heterokedastisitas namun, jika nilai sig t lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk lebih jelasnya hasil uji heterokedastisitas ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

TABEL 4. 7
HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	.372	2.308		
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.024	.071	-.074	-.338
	Sistem Pelaporan	.048	.086	.123	.565

a. *Dependent Variable: RES2*

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing variabel independen menunjukkan hasil p-value (sig-t) > 0,05. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan Sistem Pelaporan (X2) memiliki nilai sig t > 0,05. Peneliti menyimpulkan bahwa tidak terjadi adanya heterokedastisitas.

D. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji Parsial-t

Pada penelitian ini, hasil uji t dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 23. Tujuan dari uji t ini adalah untuk mengukur secara parsial pengaruh antara variabel *independent* terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain yang dianggap konstan. Jika nilai t signifikan $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel *independent* mempengaruhi variabel *dependent*. Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan tabel uji t ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

TABEL 4. 8
HASIL UJI T

Model		<i>Coefficients^a</i>				
		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	<i>(Constant)</i>	3.592	3.570		1.006	.322
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.355	.110	.407	3.228	.003
	Sistem Pelaporan	.533	.133	.508	4.022	.000

a. *Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja*

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Berdasarkan hasil Uji parsial (Uji-t) pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) dengan nilai t-hitung 3,228 $>$ nilai t-tabel 1,693 dan nilai sig.t 0,03 $<$ $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran

Anggaran (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), hal ini membuktikan bahwa keputusan H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak.

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Berdasarkan hasil Uji parsial (Uji-t) pada variabel Sistem Pelaporan (X_2) dengan nilai t_{hitung} 4,022 > nilai t_{tabel} 1,693 dan nilai sig.t 0,00 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pelaporan (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), hal ini membuktikan bahwa keputusan H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak.

2. Hasil Uji F

Pada penelitian hasil uji F dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 23. Tujuan dari hasil uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *independent* berpengaruh terhadap variabel *dependent*. Dengan kriteria pengujian tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau nilai signifikansi 5% ($\alpha=0,05$). Jika nilai signifikasinya > 0,05 H_a ditolak dan jika nilai nya < 0,05 maka H_a diterima. Untuk lebih jelasnya, hasil uji F dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 4. 9
HASIL UJI F
ANOVA^a

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	150.920	2	75.460	32.211	.000 ^b
<i>Residual</i>	74.966	32	2.343		
<i>Total</i>	225.886	34			

a. *Dependent Variable:* Akuntabilitas Kinerja

b. *Predictors: (Constant)*, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, hasil uji F diperoleh F_{hitung} sebesar 32,211 > F_{tabel} sebesar 2,89 dan nilai P value sebesar 0,000^b lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima.

3. Hasil Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Pada penelitian hasil uji R^2 dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 23. Tujuan dari hasil uji R^2 ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel *independent* berpengaruh terhadap variabel *dependent*.

TABEL 4. 10
HASIL UJI R^2 (KOEFSIEN DETERMINASI)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.817 ^a	.668	.647	1.53059

a. *Predictors: (Constant)*, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran

b. *Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja*

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, hasil uji R^2 bahwa koefisien determinasi yang disesuaikan *R Square* sebesar 0,668. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independent X^1 dan X^2 (Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan) yang terjadi pada variabel dependent Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sebesar 66,8% ditentukan oleh variabel Kejelasan

Sasaran Anggaran (X^1) dan Sistem Pelaporan (X^2), selebihnya sebesar 33,2% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisa regresi ini.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis (H_1) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hal ini telah dibuktikan, dengan nilai ketentuan $t_{tabel} = 1,69$ yaitu $t_{hitung} 3,228$ dan nilai $sig.t 0,03 < a = 0,05$. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semakin baik tingkat kejelasan sasaran anggaran maka semakin baik juga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan dihasilkan dan begitu pula sebaliknya.

2. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa hasil penelitian ini mendukung Hipotesis (H_2) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada Sistem Pelaporan (X_2) terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hal ini telah dibuktikan dengan nilai ketentuan $t_{tabel} = 1,693$ yaitu $t_{hitung} 4,022$ dan nilai $sig.t 0,00 < 0,05$. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semakin baik tingkat sistem pelaporan maka akan semakin baik juga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan dihasilkan.

3. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa hasil penelitian ini mendukung Hipotesis (H_3) bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini telah dibuktikan dengan menunjukkan bahwa hasil uji F diperoleh F_{hitung} sebesar $32,211 > F_{tabel}$ sebesar $2,89$ dan nilai P value sebesar $0,000^b < 0,05$, $\alpha = 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, semakin baik tingkat Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan maka semakin baik pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dihasilkan.

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, hasil uji F diperoleh F_{hitung} sebesar $32,211 > F_{tabel}$ sebesar $2,89$ dan nilai P value sebesar $0,000^b$ lebih kecil dari $0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian mengenai Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros, maka peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros.
2. Sistem Pelaporan secara berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros.
3. Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian berupa analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian mengenai Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah peneliti menyadari bahwa masih banyaknya terdapat keterbatasan pada penelitian ini, maka dari itu peneliti memberikan saran yaitu :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros agar terus meningkatkan Sistem Pelaporan dengan melakukan peningkatan dan memaksimalkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah agar lebih tegas dalam menindak lanjuti wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan cara memberikan sanksi.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel penelitian diluar dari variabel yang telah diteliti sehingga dapat meningkatkan penelitian yang menjelaskan dengan penelitian ini sehingga diharapkan mampu menambah referensi serta memperluas objek penelitian baik itu di pemerintahan maupun swasta.



DAFTAR PUSTAKA

- Ansharullah, K. (2017, Januari). Pengaruh Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros. *Ecomomis Bosowa Journal*, 3, 117-126.
- Apriliani, Triana Sukma (2022) *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo*. Undergraduate Thesis, Politeknik Negeri Jember.
- Cantika, Yulia. (2018). *“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar”*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Deni Harianto, K. A. (2021, Agustus 22). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6, 122-139.
- Depari, Risky Prayoga. (2021). *“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru”*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dewi Aprilianti, M. W. (2020, Juli). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 15, 150-159.

Evada Dewata, Y. S. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8, 541-550.

Hafzhan, Muhammad (2021) *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Hasanah, Atikah. 2021. *“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Vi Medan)”*. Skripsi. Medan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Helin Gustri Mulya, E. F. (2022, Februari). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. . *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4, 192-212.

Nursyam, N., Sejan, M., & Sejan, M. (2019). Pengaruh Pendapatan Keuangan Daerah Di Tinjau Dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 1(1), 33-40.

Ristina, Wahyu. 2018. *“Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Studi Kasus Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone)*. Skripsi. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rio Pratama, H. A. (2019, Februari). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntans*, 1, 429-444.

Sadeli, Y. A. (2018, Desember). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Permerintah Kota Makassar. *Jurnal Tangible*, 3(2), 169-183.

Safitri, Nur Heni. 2020. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen). Skripsi. Yogyakarta. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.

Siska Septiani, Siska Yulia Defitri, & Juita Sukraini. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Solok). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 83–102.
Retrieved from.

<https://journal.unimaramni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/67>

- Vernanda, Valentine Vita. 2017. *“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Wonosobo)”*. Skripsi. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Wea, Stefania Azi. (2021). *“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo)”*. Thesis, Universitas Flores.
- Widaryanti, N. L. (2020, Desember). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15, 477- 492.
- Yogi Isnanto, S. W. (2019, Oktober). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15, 489 – 501.
- Wulandari, Desi Isma. Analisis Penyusunan Dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros). *Economics Bosowa*, [S.l.], v. 6, n. 004, p. 116-`129, feb. 2021. ISSN 2477-0655. Available at:

<<http://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/392>>.

Date accessed: 15 jan. 2023.

Yogi Isnanto, S. W. (2019, Oktober). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15, 489 – 501.





A. Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian

1. Surat Permohonan Ijin Penelitian



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568
<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A.053/FEB/UNIBOS/1/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Melakukan Pengambilan Data

Kepada Yth
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros

Di -
Maros

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Nur Hawalya
NIM : 4519013004
Program Studi : Akuntansi
No. Tlp/HP : 082191589988


Akan melakukan Penelitian dengan Judul :
‘ Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros ‘

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 13 Januari 2023

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis


Dr. Hj. Merminawati Abubakar, SE., MM
NIDN. 03 2412 680

Tembusan
1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip

2. Surat Balasan Permohonan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Asoka Maros Sulawesi-Selatan, Kode Pos 90511
Email : bapenda.maros@gmail.com, website:maroskab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/77.0/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. TAKDIR D, MM
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR HAWALYA
Stambuk : 4519013004
Tempat Tanggal Lahir : Maros, 13 April 2001
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Fakultas/Prodi : Ekonomi & Bisnis/Akuntansi, Universitas Bosowa

Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Maros dengan ini kami memberikan izin untuk maksud tersebut yang dimulai pada tanggal 02 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023. Dengan mengikuti aturan yang berlaku pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Maros

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 24 Januari 2023


KEPALA BADAN
IR. H. TAKDIR D. MM
Pangkat / Pembina Utama Muda
NIP. 196712011997031004

B. Lampiran 2 : Instrumen Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner.

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden.

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, peneliti mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner dalam rangka penelitian peneliti yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros”

Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadiran kuisisioner ini sedikit banyak akan mengganggu aktifitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berpartisipasi dalam pengisian daftar pertanyaan berdasarkan keadaan yang sebenar-benarnya.

Kuesioner ini terdiri atas sejumlah pernyataan. Perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa keberhasilan penelitian ini sangat tergantung dari partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab kuesioner. Bapak/Ibu diminta untuk menjawab semua pertanyaan secara terbuka, jujur, dan apa adanya. Jawaban tidak akan mempengaruhi penilaian atas kinerja maupun karir Bapak/Ibu dan tidak ada jawaban yang bernilai benar atau salah. Sesuai kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan peneliti jaga kerahasiannya.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kesediaan Bapak / Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Wassalamuallaikum wr.wb...

Hormat Saya,

Nur Hawalya

NIM : 4519013004



IDENTITAS RESPONDEN

Nama : (boleh inisial)

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*

Umur :

Instansi :

Kuesioner latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja:

1. Jenjang pendidikan formal yang Bapak/Ibu/Saudara/i tempuh:

- SLTA
- D3
- S1
- S2
- Lainnya :

2. Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara/i bekerja saat ini :

- < 1 tahun
- 1 tahun – 5 tahun
- > 5 tahun

3. Jabatan / Bagian saat ini:

- Kepala Badan / Dinas / Instansi.....
- Kepala Bidang
- Kepala Sub Bidang.....
- Sub Koordinator.....
- Lainnya :

Cara Pengisian Kuesioner :

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda check list (√) pada pilihan jawaban yang tersedia pada tabel sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban dengan memilih:

1. **STS** : Sangat Tidak Setuju
2. **TS** : Tidak Setuju
3. **S** : Setuju
4. **SS** : Sangat Setuju

a. Kejelasan Sasaran Anggaran

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Terdapat kejelasan sasaran anggaran pada satuan kerja ini.				
2.	Terdapat spesifikasi sasaran anggaran pada satuan kerja ini.				
3.	Saya dapat mengetahui tingkat kepentingan sasaran anggaran pada setiap program.				
4.	Saya dapat mengetahui secara jelas <i>Outcome</i> / hasil yang harus dicapai pada setiap program dan kegiatan.				
5.	Ketidajelasan sasaran anggaran perlu dihindari dalam penentuan rencana anggaran dimasing-masing unit.				
6.	Pimpinan dan Staf mempertanggungjawabkan (<i>accountable</i>) hasil dari suatu program / kegiatan proyek yang telah dilakukan.				
7.	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin.				
8.	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program/ kegiatan/ proyek.				

9.	Saya menyadari sasaran anggaran satuan kerja APBD tersebut merupakan hal yang penting sehingga penyelesaian kegiatan yang sesuai dengan ketetapan dalam anggaran tersebut perlu diprioritaskan.				
10.	Pada instansi tempat saya bekerja, anggaran merupakan harapan bagi instansi di awal tahun anggaran, Sedangkan pada akhir tahun, anggaran merupakan standar untuk mengevaluasi kinerja instansi.				

Sumber : Fika Andika Sari (2017), Karismawati Agustin (2023), dan Siti Hartini Amalia(2017)

b. Sistem Pelaporan

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Pada instansi tempat saya bekerja, laporan keuangan disajikan sesuai standar yang berlaku.				
2.	Pada instansi tempat saya bekerja, laporan keuangan telah disajikan secara lengkap.				
3.	Laporan keuangan yang dihasilkan berkaitan antar periode.				
4.	Pada instansi tempat saya bekerja, laporan keuangan yang dihasilkan telah memberikan informasi untuk				

	mengoreksi ekspektasi di masa lalu.				
5.	Pada instansi tempat saya bekerja, informasi keuangan telah disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum.				
6.	Pada instansi tempat saya bekerja, informasi keuangan telah disajikan untuk memenuhi kebutuhan khusus.				
7.	Pada instansi tempat saya bekerja informasi keuangan pada laporan keuangan yang dihasilkan dapat diuji.				
8.	Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.				
9.	Pada instansi tempat saya bekerja, informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan periode sebelumnya.				
10.	Pada instansi tempat saya bekerja, informasi keuangan yang disajikan dapat dibandingkan oleh pengguna laporan keuangan periode sebelumnya.				

Sumber : Nur Heni Safitri (2020)

c. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Visi dan misi program instansi tempat saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.				
2.	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program.				
3.	Pada instansi tempat saya bekerja, terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.				
4.	Pada instansi tempat saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin.				
5.	Pada instansi tempat saya bekerja, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.				
6.	Pada instansi tempat saya bekerja, dilakukan pengecekan terhadap jalannya program.				
7.	Kegiatan / program yang disusun oleh instansi tempat saya bekerja, telah mengkomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat. .				

8.	Pada instansi tempat saya bekerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. .				
9.	Pada instansi tempat saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.				
10.	Pada instansi tempat saya bekerja, dilakukan pembuatan laporan kegiatan atau program yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada atasan.				

Sumber : Nur Heni Safitri (2020)

C. Lampiran 3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		35
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.48488624
<i>Most extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.104
	<i>Positive</i>	.091
	<i>Negative</i>	-.104
<i>Test Statistic</i>		.104
<i>Asymp Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is normal

b. Calculated from data

c. Lilliefors significance correction

d. This is a lower bound of the true significance

Sumber : Data yang diolah,2023

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.	<i>Collinearity Statistics</i>	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	<i>(Constant)</i>	3.592	3.570		1.006	.322		
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.355	.110	.407	3.228	.003	.651	1.536
	Sistem Pelaporan	.533	.133	.508	4.022	.000	.651	1.536

a. *Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja*

Sumber : Data primer yang diolah, 2023.

3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.372	2.308		.161	.873
	Kejelasan Sasaran	-.024	.071	-.074	-.338	.738
	Anggaran					
	Sistem Pelaporan	.048	.086	.123	.565	.576

a. *Dependent Variable: RES2*

Sumber : Data primer yang diolah, 2023



D. Lampiran 4 Data Mentah

1. Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁)

No.	Butir Pertanyaan										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	33
2.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
3.	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	37
4.	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
5.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	38
6.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
7.	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	37
8.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
9.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
10.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
11.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
12.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
13.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
14.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
15.	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	32
16.	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	26
17.	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	34
18.	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	33
19.	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	33
20.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
21.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
22.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
23.	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	32
24.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32

25.	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	32
26.	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	33
27.	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	32
28.	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	33
29.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
30.	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	35
31.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
32.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
33.	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31
34.	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
35.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30



2. Sistem Pelaporan (X₂)

No.	Butir Pertanyaan										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3.	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	36
4.	4	4	4	4	5	3	4	4	3	3	38
5.	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	36
6.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
7.	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
8.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
9.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
10.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
11.	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	29
12.	3	3	3	3	3	3		3	3	3	27
13.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
14.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
15.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
16.	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
17.	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	34
18.	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	33
19.	4	3	3	2	3	3	4	4	3	3	32
20.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
21.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
22.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
23.	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31
24.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
25.	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31
26.	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31

27.	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	34
28.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
29.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
30.	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	37
31.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
32.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
33.	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33
34.	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	33
35.	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33



3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No.	Butir Pertanyaan										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	33
2.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
3.	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	37
4.	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
5.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	38
6.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
7.	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	37
8.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
9.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
10.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
11.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
12.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
13.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
14.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
15.	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	32
16.	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	26
17.	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	34
18.	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	33
19.	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	33
20.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
21.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
22.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
23.	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	32
24.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
25.	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	32
26.	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	33
27.	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	32
28.	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	33
29.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
30.	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	35
31.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
32.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
33.	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31
34.	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
35.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30

E. Lampiran 5 Analisis dan Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Parsial Uji t

Coefficients^a

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	<i>(Constant)</i>	3.592	3.570		1.006	.322
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.355	.110	.407	3.228	.003
	Sistem Pelaporan	.533	.133	.508	4.022	.000

a. *Dependent Variable:* Akuntabilitas Kinerja

Sumber : Data primer yang diolah, 2023.

2. Hasil Uji F

ANOVA^a

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	150.920	2	75.460	32.211	.000 ^b
	<i>Residual</i>	74.966	32	2.343		
	<i>Total</i>	225.886	34			

a. *Dependent Variable:* Akuntabilitas Kinerja

b. *Predictors:* (*Constant*), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

3. Hasil Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.817 ^a	.668	.647	1.53059

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4. Table Parsial Uji t

TABEL NILAI KRITIS DISTRIBUSI T

df	One-Tailed Test						
	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
	Two-Tailed Test						
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,002
1	1,000000	3,077684	6,313752	12,706205	31,820516	63,656741	318,308839
2	0,816497	1,885618	2,919986	4,302653	6,964557	9,924843	22,327125
3	0,764892	1,637744	2,353363	3,182446	4,540703	5,840909	10,214532
4	0,740697	1,533206	2,131847	2,776445	3,746947	4,604095	7,173182
5	0,726687	1,475884	2,015048	2,570582	3,364930	4,032143	5,893430
6	0,717558	1,439756	1,943180	2,446912	3,142668	3,707428	5,207626
7	0,711142	1,414924	1,894579	2,364624	2,997952	3,499483	4,785290
8	0,706387	1,396815	1,859548	2,306004	2,896459	3,355387	4,500791
9	0,702722	1,383029	1,833113	2,262157	2,821438	3,249836	4,296806
10	0,699812	1,372184	1,812461	2,228139	2,763769	3,169273	4,143700
11	0,697445	1,363430	1,795885	2,200985	2,718079	3,105807	4,024701
12	0,695483	1,356217	1,782288	2,178813	2,680998	3,054540	3,929633
13	0,693829	1,350171	1,770933	2,160369	2,650309	3,012276	3,851982
14	0,692417	1,345030	1,761310	2,144787	2,624494	2,976843	3,787390
15	0,691197	1,340606	1,753050	2,131450	2,602480	2,946713	3,732834
16	0,690132	1,336757	1,745884	2,119905	2,583487	2,920782	3,686155
17	0,689195	1,333379	1,739607	2,109816	2,566934	2,898231	3,645767
18	0,688364	1,330391	1,734064	2,100922	2,552380	2,878440	3,610485
19	0,687621	1,327728	1,729133	2,093024	2,539483	2,860935	3,579400
20	0,686954	1,325341	1,724718	2,085963	2,527977	2,845340	3,551808
21	0,686352	1,323188	1,720743	2,079614	2,517648	2,831360	3,527154
22	0,685805	1,321237	1,717144	2,073873	2,508325	2,818756	3,504992
23	0,685306	1,319460	1,713872	2,068658	2,499867	2,807336	3,484964
24	0,684850	1,317836	1,710882	2,063899	2,492159	2,796940	3,466777
25	0,684430	1,316345	1,708141	2,059539	2,485107	2,787436	3,450189
26	0,684043	1,314972	1,705618	2,055529	2,478630	2,778715	3,434997
27	0,683685	1,313703	1,703288	2,051831	2,472660	2,770683	3,421034
28	0,683353	1,312527	1,701131	2,048407	2,467140	2,763262	3,408155
29	0,683044	1,311434	1,699127	2,045230	2,462021	2,756386	3,396240
30	0,682756	1,310415	1,697261	2,042272	2,457262	2,749996	3,385185
31	0,682486	1,309464	1,695519	2,039513	2,452824	2,744042	3,374899
32	0,682234	1,308573	1,693889	2,036933	2,448678	2,738481	3,365306
33	0,681997	1,307737	1,692360	2,034515	2,444794	2,733277	3,356337
34	0,681774	1,306952	1,690924	2,032245	2,441150	2,728394	3,347934
35	0,681564	1,306212	1,689572	2,030108	2,437723	2,723806	3,340045
36	0,681366	1,305514	1,688298	2,028094	2,434494	2,719485	3,332624
37	0,681178	1,304854	1,687094	2,026192	2,431447	2,715409	3,325631
38	0,681001	1,304230	1,685954	2,024394	2,428568	2,711558	3,319030
39	0,680833	1,303639	1,684875	2,022691	2,425841	2,707913	3,312788
40	0,680673	1,303077	1,683851	2,021075	2,423257	2,704459	3,306878

5. Table Uji F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

F. Lampiran 6 : Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir Skripsi

UNIVERSITAS BOSOWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568
http://www.universitasbosowa.ac.id

2022.12.29

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BOSOWA
Nomor : A.1.15 /FEBI/UNIBOS/III/2022

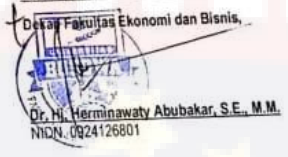
Tentang
PEMBIMBING TUGAS AKHIR/SKRIPSI PRODI AKUNTANSI
TAHUN AKADEMIK GANJIL 2022/2023 GEL III

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka proses penulisan Proposal mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, maka perlu mengangkat Pembimbing/Konsultan.
b. Bahwa pengangkatan para Pembimbing/Konsultan Proposal mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Statuta Universitas Bosowa Tahun 2018
5. Peraturan Akademik Bosowa Makassar Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 5 lampiran surat keputusan ini diangkat sebagai Pembimbing/Konsultan Proposal mahasiswa yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 3 dengan judul Proposal sebagaimana dalam lajur 4.
Kedua : Kepada mereka yang tersebut namanya pada butir pertama di atas, dibenkan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan Universitas Bosowa.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 26 Desember 2022
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, S.E., M.M.
NIDN. 0924126801

Tembusan :
1. Vice Rektor I Universitas Bosowa
2. Wakil Dekan I & II Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Ketua Program Studi
4. Arsip

4519013007	Ridlah Awaluh Andi	Pengaruh Etika Profesi Dan Risiko Audit Terhadap Paruhanggun Tingkat Materialitas (Studi Kasus Pada Kab Makassar)	1 ^o Dr. Sumawati Marjani, SE, M Si 2 ^o Indah Syamsuddin, SE, M Ak
4519013024	Nurhasanah	Analisis Kinerja Manajerial Dan Perilaku Karyawan Terhadap Pengendalian Kos Pada PT. Pegadaian Cabang Antang	1 ^o Dr. Seri Suliani, SE, M Si 2 ^o Thanwan, SE, M Si
4519013004	Nurhaswalya	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros	1 ^o Dr. Husnulhidayah Riemang, SE, M Si 2 ^o Fardah, SE, M Si, Ak, CA
4519013019	Muhammad Azhar Yusuf	Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Penjualan Kredit Pada PT. Kalla Toyota Cabang Bulukumba	1 ^o Dr. Muthia Ruslan, SE, M Si 2 ^o Nur Fadiah Amir, SE, Ak, M Si
4519013017	Sheren Gloria Natalin	Pengaruh Budaya Organisasi Dan Pelatihan Auditor Terhadap Profesionalisme Auditor Pemula Pada Kantor Akuntan Publik Kota Makassar	1 ^o Dr. A. Anjuddin Mane, SE, SH, M Si, MH 2 ^o Fardah, SE, M Si, Ak, CA
4519013007	Enjelin Raya Kombong	Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Bank HTPN	1 ^o Dr. Muhammad Yusuf Saleh, SE, M Si 2 ^o Nur Fadiah Amir, SE, Ak, M Si
4519013099	Rohillah Raso	Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Masyarakat Dalam Menyerahkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1 ^o Dr. Lukman Setiawan, S Si, S Psi, SE, MM 2 ^o Indah Syamsuddin, SE, M Ak
4519013086	Durga Bryan Krisdamindra	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengolahan Tabung Nasabah Pada BNI UJIM	1 ^o Dr. A. Anjuddin Mane, SE, SH, M Si, MH 2 ^o Fardah, SE, M Si, Ak, CA
4519013021	Yelmarsita Yohana Tampatonda	Pengaruh Penerapan Sistem E-billing Dan E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan	1 ^o Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE, M Si 2 ^o Thanwan, SE, M Si